

DAMPAK RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PBB NOMOR 2127 TERHADAP KONFLIK INTERNAL REPUBLIK AFRIKA TENGAH TAHUN 2012 – 2016

Oleh : Ogi Dandi Mebiyunio

Email : ogidandiyunio@gmail.com

Pembimbing : Sugito, S.IP., M.Si.

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Ringroad Barat Tamantirto, Kasihan, Bantul 55183

Abstract

This research analyzes the impact of the UNSC resolutions 2127 toward internal conflict issue in Central African Republic (CAR). According to history of CAR most of government in period could not handle the stability of state. Dissatisfaction from citizen became threat to the security of internal state. Begins with a demonstration and than turned into rebel coalition against government. The condition of CAR was step by step exploited by Seleka (rebel army/moeslim group). Bangui as the capital city of CAR had been captured by Seleka. The other side, majority of people in CAR created Anti-Balaka (ex-military and christians group) to encounter Seleka. These rebels aiming powers and natural resources and already made a big internal conflict. UNSC as an international organization is responsible to securing the Central African Republic. The role of UNSC is to implement peacekeeping, peacemaking and peacebuilding on CAR security by stating resolution number 2127 (2013).

Abstrak

Dalam penelitian ini menganalisis tentang dampak resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2127 terhadap konflik internal di Republik Afrika Tengah (RAT). Berdasarkan sejarah RAT, kebanyakan pemerintahan disetiap periode tidak mampu mengendalikan stabilitas negaranya. Ketidakpuasan masyarakat berubah menjadi ancaman keamanan internal negara. Dimulai dengan aksi demonstrasi dan kemudian berkembang menjadi koalisi pemberontak yang menentang pemerintah. Situasi di Republik Afrika Tengah seiring berjalannya waktu dieksploitasi oleh Kelompok Seleka (Pasukan Pemberontak/kelompok muslim). Bangui sebagai ibukota berhasil direbut oleh Seleka. Disisi lain, terdapat kelompok mayoritas membentuk Anti-Balaka sebagai perlawanan atas keserakahan kelompok Seleka. Kedua kelompok ini mengincar kekuasaan dan sumber daya alam RAT dan telah membuat konflik internal yang besar. Hal tersebut membuat DK PBB sebagai organisasi internasional terpanggil untuk mengamankan Republik Afrika Tengah. Upaya DK PBB ialah menerapkan resolusi 2127 yang berisi tiga cara resolusi konflik (Peacekeeping, Peacemaking, Peacebuilding).

Keywords : *UNSC Resolutions, Peacekeeping, Peacemaking, Peacebuilding, Internal Conflict, International Organization, Conflict Resolution, Africa.*

PENDAHULUAN

Konflik di salah satu wilayah Timur Tengah yaitu *Central African Republic* (CAR) dapat dibilang konflik yang tenggelam oleh isu-isu konflik negara lain dan juga sebagai negara yang terlewatkan (Permesi, 2014). Tidak jauh berbeda dengan negara-negara di Afrika lainnya, kemiskinan dan instabilitas politik membebani CAR dari tahun 1960. Letak geografis negara ini pun relatif tidak menguntungkan, hal ini disebabkan oleh lokasi negara yang tidak bersentuhan dengan laut atau disebut *Landlock State*. Negara ini berbatasan langsung dengan Kongo di selatan, sebelah timur ada Sudan, bagian utara terdapat Chad, dan Kamerun di sisi barat (Djafar, 2012).

Meskipun telah meraih kemerdekaan dari Perancis di tahun 1960, konflik terus bermunculan di negara ini. Pada saat pergantian kepemimpinan hampir di setiap transisinya di-inisiasi kudeta. Contohnya ketika Presiden David Dacko mencoba membuat rezim partai tunggal untuk memperkuat keberlangsungan pemerintahannya. Kepemimpinan Dacko dikudeta oleh Jendral Jean B Bokassa dan tahta kepresidenan pindah ke tangan Bokassa. Tidak sampai di tangan Bokassa saja, kepemimpinan Republik Afrika Tengah kemudian bergilir lagi ke David Dacko, dilanjutkan oleh Andre Kolingba, Ange Felix-Patasse, sampai di Francois Bozize pemberontakan semakin menjadi-jadi.

Kinerja kepemimpinan Francois Bozize di awal periode hingga akhir jabatannya dianggap tidak pernah memprioritaskan perkembangan nasional dan tata laksana pemerintahan yang baik atau sering disebut sebagai *Good Governance*

(GlobalSecurity, 2017). Respon agresif terhadap pemerintah oleh sekelompok oposisi muncul merespon ketidaksesuaian itu. Persatuan Pasukan Demokratik untuk Persatuan (UFDR), Konvensi Patriot untuk Keadilan dan Perdamaian (CPJP), dan Konvensi Patriotik untuk Menyelamatkan Negara (CPSK) hadir bertindak melawan pemerintah menuntut hak-hak masyarakat. Di tahun 2007, pemerintah mengupayakan rekonsiliasi dengan dua kelompok oposisi tersebut untuk segera menunaikan kewajibannya sebagai pemerintah dengan disepakatinya perjanjian damai Birao (Eberhard, 2014).

Hasil dari perjanjian Birao setelah diamati satu tahun masih belum menunjukkan perubahan menurut kelompok oposisi lain seperti Armee Populaire pour la Restauration de la Democratie atau Tentara Rakyat untuk Pemulihan Demokrasi (APRD) dan FDPC mendesak ulang pemerintah untuk melakukan kesepakatan damai di tahun 2008 dengan nama perjanjian Libreville yang berisi pelucutan senjata, demobilisasi, dan reintegrasi (DDR), ditambah dengan pembagian kekuasaan politik untuk partai-partai lain. Alhasil, pemerintah Republik Afrika Tengah tetap tidak serius dalam menerapkan perjanjian Libreville. Oposisi-oposisi tidak tinggal diam melakukan manuver mereka kepada pemerintah sampai pada bulan Desember 2012 terbentuklah kelompok koalisi pemberontak baru bernama Seleka yang dipimpin oleh Michael Djotodia (Firman, 2017).

Setelah tahun 2012 koalisi pemberontak Seleka memulai aksinya dan mencoba merebut wilayah inti Republik Afrika Tengah yaitu Bangui yang merupakan Ibu Kota negara. Serangan demi serangan dilancarkan hingga Bozize berhasil dilengserkan di tahun 2013. Tidak hanya Bangui, tetapi daerah sekitarnya

pun berhasil diambil alih. Secara sepihak Michael Djotodia sebagai penggerak pemberontak secara sepihak mengumumkan Presiden dan Menteri Pertahanan Republik Afrika Tengah telah diganti oleh dirinya (Republika, 2015). Pemberontakan Seleka ini telah mengarah pada Genosida, segala tindakan kekerasan telah sampai ke titik keresahan rakyat sipil Republik Afrika Tengah yang mayoritas umat kristiani. Dengan desakan pemberontak ini munculah milisi perlawanan dari kubu kristiani dengan menamakan dirinya Anti-Balaka (Haryanto, 2017).

Konflik antara kubu pemerintah dan oposisi kemudian beralih menjadi konflik agama antara Seleka dan Anti-Balaka di Republik Afrika Tengah ini semakin mengancam instabilitas keamanan benua Afrika dan Dunia Internasional. Kemunculan Anti-Balaka merupakan keresahan pribumi yang berisikan mayoritas non-muslim akibat kesewenang-wenangan kelompok Seleka. Anti-Balaka merasa direnggut hak dalam pengelolaan sumber daya alam karena didominasi oleh kelompok Seleka.

Jika kita perhatikan sejak kemerdekaannya hingga kini, Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan Dewan Keamanan PBB memfokuskan isu-isu keamanan di beberapa daerah seperti timur tengah. Pada tahun 1998 Dewan Keamanan PBB telah memulai misi perdamaian disana (UNSC, 1998). Namun, setelah konflik mengalami eskalasi yang semakin tajam lebih tepatnya pasca perang Seleka dan Anti-Balaka meletus di tahun 2013 yang memakan 1.000 korban jiwa dan di tahun 2014 sampai memaksa sekitar satu juta orang meninggalkan rumah mereka (Rimanews, 2014). Dewan Keamanan PBB melanjutkan tanggung jawabnya

sebagai Organisasi Internasional yang dipercaya mengatasi isu perdamaian dan keamanan, memperbaiki keadaan dengan resolusi perdamaian yang disepakati bersama oleh anggota organisasi tersebut.

Tulisan ini akan mencoba menjelaskan bagaimana resolusi nomor 2127 membawa dampak bagi konflik internal di Republik Afrika Tengah dengan batasan tahun 2012-2016.

KERANGKA KONSEPTUAL

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua kerangka konsep untuk dijadikan landasan penelitian yang jelas yakni konsep Organisasi Internasional dan konsep Resolusi Konflik. Penjabarannya sebagai berikut :

Organisasi Internasional menurut Teuku May Rudi dalam bukunya "*Administrasi dan Organisasi Internasional*" sebagai berikut:

"Pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan yang disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non pemerintah pada negara yang berbeda" (Rudi, 2009).

Kemudian Teuku May Rudi menambahkan bahwa Organisasi Internasional memiliki peran yang berdampak baik bagi masalah-masalah dunia internasional antara lain:

- a) Sebagai wadah yang bertujuan menjalin kerjasama dan untuk mengurangi peningkatan konflik antara anggota.
- b) Sebagai sarana kompromi untuk memperoleh *best decision* yang saling menguntungkan dan ada waktunya bertindak sebagai Lembaga yang mandiri untuk melaksanakan kegiatan yang diperlukan seperti kegiatan sosial kemanusiaan, bantuan pelestarian alam, operasi militer, dan lain lain (Rudi, 2009).

Dalam sudut pandang Volker Rittberger dan Bernhard Zangl, berpendapat bahwa organisasi internasional berfungsi sebagai arena dan aktor :

- a) Sebagai arena, untuk berinteraksi antar negara anggota demi terciptanya suatu rumusan kebijakan bersama.
- b) Sebagai aktor, organisasi internasional dapat menjadi aktor berbadan hukum yang mengingat negara-negara anggota telah bersepakat dan bersedia menyerahkan sebagian kedaulatannya pada organisasi internasional (Rittberger & Zangl, 2006).

Organisasi Internasional ada dan diperlukan sampai sekarang karena mampu memberikan sebuah *framework* bagi negara-negara untuk mencapai kesepakatan dalam politik internasional seiring dengan tingkat interaksi di antara negara yang semakin intens berkat kemajuan teknologi transportasi dan komunikasi (Sugito, 2016). Berperan aktif dan bertanggung jawab menjalankan ketertiban dan perdamaian internasional merupakan tugas PBB. Organisasi Internasional dibutuhkan ketika suatu negara sudah tidak mampu menyelesaikan masalah –

masalah yang berkembang. Dengan resolusi-resolusi yang dirumuskan dan disepakati bersama anggota, PBB membuktikan konsistensinya.

Di dalam Piagam PBB sendiri secara khusus menyebutkan bahwa resolusi yang dirumuskan oleh Dewan Keamanan bersifat mengikat bukan hanya kepada negara anggota PBB tetapi kepada negara-negara bukan anggota PBB sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (6) yaitu “*The Organization shall ensure that states which are not members of the United Nations act in accordance with these Principles so far as may be necessary for the maintenance of international peace and security*” (Suwardi, 2004). Berdasarkan pasal tersebut, yang tidak termasuk dalam keanggotaan PBB dan Dewan Keamanan PBB dapat dikenai kewajiban untuk melaksanakan dan terikat dengan resolusi Dewan Keamanan PBB, apalagi bagi negara yang merupakan pihak yang bersengketa atau telah mengganggu stabilitas keamanan internasional dan membahayakan perdamaian dunia menurut pengamatan bersama Dewan Keamanan PBB (Ananda, 2015).

Resolusi Konflik menurut Muhadi Sugiono dan Mohan Nazala merupakan cara penyelesaian konflik dengan mengenali sumber-sumber utama asal muasal konflik dan menemukan jalan keluar untuk mengatasi sumber-sumber tersebut (Sugiono & Nazala, 2011). Dalam menangani konflik tentu memiliki cara pendekatan yang berbeda-beda, penelitian ini menggunakan konsep resolusi konflik oleh Johan Galtung yaitu, *Peacekeeping*, *Peacemaking*, *Peacebuilding* (Galtung, 1976).

Peacekeeping merupakan tahap dimana intervensi militer berupaya untuk menghentikan atau mengurangi tindak kekerasan sebagai simbol penjaga perdamaian yang tidak memihak. Proses selanjutnya yaitu *Peacemaking* yang bertujuan memulihkan hubungan persahabatan sikap politik dan strategi dari pihak yang berkonflik melalui negosiasi, arbitrase, mediasi terkhusus pada petinggi elit. Dan apabila telah masuk kedalam kondisi aman dan layak maka tahap terakhir *Peacebuilding* sebagai proses penerapan rekonstruksi sosial, politik, ekonomi demi mewujudkan perdamaian abadi. Dengan proses *peacebuilding* ditargetkan *negative peace* (tidak adanya kekerasan) berubah menjadi *positive peace* yang berarti seluruh lapisan masyarakat menikmati kesejahteraan ekonomi, keadilan sosial, keterwakilan politik yang efektif (Hermawan, 2007).

PEMBAHASAN

Resolusi DK PBB merupakan cara penyelesaian konflik dengan mengenali sumber-sumber utama asal muasal konflik dan menemukan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan tertentu sesuai keputusan bersama anggota-anggota DK PBB yang berupa teguran, sanksi dan operasi militer (Sugiono & Nazala, 2011). Resolusi nomor 2127 merupakan lanjutan dari resolusi 2121 yang berisi tentang peringatan terhadap kekerasan yang telah melanggar hukum humaniter internasional, menekankan program *disarmament, demobilization and reintegration* (DDR) dan menyatakan kesanggupan untuk mengambil tindakan yang merusak perdamaian, stabilitas dan keamanan termasuk melawan pihak-pihak yang melanggar ketentuan perjanjian.

Dewan Keamanan PBB di sponsori oleh Perancis memutuskan resolusi 2127 untuk meredam kekacauan yang dilakukan oleh rezim Francois Bozize, Kelompok Seleka, dan Kelompok Anti-Balaka. Bekerjasama dengan organisasi internasional lain seperti Uni Afrika dan *Economic Community of Central African States* (ECCAS). Organisasi internasional memiliki kapasitas sebagai wadah yang bertujuan menjalin kerjasama dan untuk mengurangi peningkatan konflik dan sebagai aktor karena negara-negara telah menyerahkan sebagian kedaulatannya (Rittberger & Zangl, 2006). Melalui Resolusi 2127 upaya konkrit *Peacemaking*, *Peacekeeping* dan *Peacebuilding* dapat membantu meringankan konflik di RAT.

A. Penurunan Konflik Internal di Republik Afrika Tengah

Dewan Keamanan melalui resolusi 2127 tahun 2013 menetapkan untuk membantu melindungi warga sipil, menstabilkan negara dan segera memulihkan otoritas negara atas wilayahnya, serta menciptakan kondisi yang kondusif untuk kepentingan warga sipil yang tidak bersalah. Mengajak masyarakat internasional untuk menyoroti dan membantu mengembalikan kedaulatan Republik Afrika Tengah. Melalui resolusi 2127 Dewan Keamanan menyambut baik kontribusi Uni Afrika dan ECCAS dalam upaya penegakan demokrasi dan penyelamatan kedaulatan RAT.

Pada tanggal 5 Desember 2013 Dewan Keamanan PBB dengan disponsori atau diusulkan oleh Perancis memutuskan untuk mengeluarkan resolusi 2127 yang berisi:

“Further reiterates that, in accordance with the African Charter on Democracy, Elections and Governance, the Libreville Agreements, the relevant ECCAS decisions and the Transition, the Head of Transition, the Prime Minister, the President of the National Transition Council (NTC), the Ministers and members of the NTC bureau cannot participate in the elections intended to restore the constitutional order”

“Urges the Transitional Authorities to take all appropriate steps for immediate disarmament, cantonment and dismantling of all armed groups, throughout the whole territory of the country, consistent with international standard”

Kedua pernyataan tersebut termasuk dalam *Political Process* yang merupakan fokus DK PBB untuk mengembalikan kedaulatan negara. Kutipan pertama menegaskan perintah dan larangan untuk memulihkan tatanan konstitusional, yang kedua menyinggung masalah tindakan yang harus diambil oleh pemegang otoritas transisi pemerintahan Republik Afrika Tengah. Pemegang otoritas transisi (NTC) tersebut dibawah pengawasan dari Uni Afrika dan UNSC untuk memulihkan struktur pemerintahan. *National Transition Council* (NTC) diketuai oleh Alexandre-Ferdinand Nguandet. Pada saat itu Michael Djotodia merupakan pemimpin negara dan tidak mampu mengendalikan kekacauan yang semakin meningkat.

Didalam resolusi 2127 juga mendesak pemegang otoritas transisi (NTC) untuk bekerjasama menerapkan program *disarmament, demobilization and*

reintegration (DDR) dan program security sector reform (SSR). Pernyataan yang tertera dalam resolusi 2127 sebagai berikut:

“Urges Transitional Authorities to develop and implement disarmament, demobilization and reintegration (DDR) or disarmament, demobilization, repatriation, reintegration and resettlement (DDRRR) programmes including for former Seleka elements who will not be integrated into the security forces and children associated with armed forces and groups”

“Further urges the Transitional Authorities to develop and to implement a comprehensive and nationally owned Security Sector Reform (SSR) programme, which includes appropriate vetting procedures to reconstitute professional, balanced and representative CAR security forces selected on the basis of the respect for human rights and nationality, and calls upon the Transitional Authorities to cooperate with BINUCA and MISCA for these purposes”

Dalam pernyataan resolusi 2127 diatas merupakan bagian DDR/SSR nomer 11 dan 12. DK PBB mendesak NTC untuk mengimplementasikan program DDR. Dan kelompok Seleka ditegaskan tidak akan diikutsertakan dalam pasukan keamanan. Reformasi Sektor Keamanan (SSR) juga ditekankan kepada pemegang otoritas transisi yang mencakup prosedur perekrutan kembali pasukan keamanan RAT yang profesional, seimbang dan representatif untuk bekerjasama dengan BINUCA dan MISCA untuk mengamankan Republik Afrika Tengah. BINUCA dan MISCA merupakan produk operasi *peacekeeping* dan *peacebuilding*.

Penurunan konflik terjadi ketika Kelompok Seleka dan Anti-Balaka mulai memilih untuk melindungi kelompoknya karena dua alasan yaitu karena merasa telah memiliki daerah kekuasaannya masing-masing dan telah didesak dan dikenakan sanksi seperti embargo ekspor senjata dan pengiriman tentara bayaran oleh Dewan Keamanan PBB. Sebagai Presiden Transisi Samba-Panza melalui programnya juga mampu menurunkan konflik karena tidak memihak kepada salah satu pemberontak. DDR dan SSR semakin ditekankan oleh Dewan Keamanan PBB dari tahun ke tahun sampai pada 2016 di Republik Afrika Tengah. Penggunaan senjata api oleh pemberontak semakin minim karena berhasil dilucuti.

Angka kematian korban konflik dari tahun 2013-2016 menurun, dari 1100 orang meninggal menjadi sekitar 30 orang yang menjadi korban kekerasan pada setiap peristiwa. Matt-Batten-Carew merupakan seorang ahli atau peneliti konflik di wilayah Timur Tengah, mengatakan bahwa penurunan korban jiwa di Republik Afrika Tengah dikarenakan oleh sebagian besar senjata baik dari militer RAT maupun pemberontak telah dilucuti dan selain itu embargo senjata semakin diperketat oleh DK PBB dan Masyarakat Internasional yang saling berkoordinasi.

B. Kemunculan Demokratisasi di Republik Afrika Tengah

Dewan Keamanan PBB melihat situasi pasca lengsernya Michael Djotodia kemudian memutuskan untuk meningkatkan *peacekeeping operation* di tahun 2014. Sekjen PBB atas keputusan resolusi 2149 membentuk MINUSCA yang merupakan gabungan antara BINUCA dan MISCA menjadi operasi militer yang lebih kuat. Sekitar 10.000 personil militer, termasuk 240 pengamat militer, 200

petugas staff dan 1.800 personil polisi. MINUSCA sebagai *peacekeeping operation* memiliki tiga prinsip dasar yaitu persetujuan dari para pihak (Consent of the parties), Keadilan (Impartiality), Tidak menggunakan kekuatan kecuali untuk membela diri dan membela mandat (Non-use of force except in self-defence and the mandate). MINUSCA menerapkan tiga prinsip tersebut untuk mengawal kemunculan demokratisasi di Republik Afrika Tengah.

Dewan Keamanan PBB menjalankan mandatnya melalui operasi militer MINUSCA mengawal berjalannya penyelenggaraan seminar nasional. Didalam seminar nasional Samba-Panza selaku Presiden Transisi RAT berdialog dengan rakyat dari seluruh penjuru Republik Afrika Tengah. Seminar ini disebut dengan Bangui Forum yang dilaksanakan pada bulan Mei 2015. Sekitar 800 warga negara RAT bersama elit pemerintah membahas empat topik penting yaitu pembangunan sosial dan ekonomi, tata kelola, keadilan dan rekonsiliasi, serta perdamaian dan keamanan. Musyawarah tersebut menghasilkan Pakta Republik untuk Perdamaian (Republican Pact for Peace). Disela-sela musyawarah pemerintah RAT juga menandatangani perjanjian pelucutan senjata, demobilisasi dan reintegrasi (DDR) dengan sepuluh kelompok pemberontak utama Republik Afrika Tengah.

Pada tanggal 13 Desember 2015 diadakan Konstitusional Referendum, MINUSCA sebagai pengawal pemilu ketika itu meminta untuk menunda pemungutan suara. Karena terdapat kekacauan di beberapa distrik seluruh Bangui diperpanjang pada tanggal 14 Desember 2015. Referendum ini dianggap oleh banyak pihak sebagai gladi resik bagi pemilihan Presiden dan Parlementer.

Keputusan pemilu diadakan pada tanggal 30 Desember, selama pemilu berlangsung kekerasan yang sebelumnya dikhawatirkan sebagian besar tidak terjadi. Pada putaran pertama tidak ada satu kandidat yang memperoleh lebih dari 50% suara. Oleh karena itu pemilihan umum putaran kedua diperlukan, pemilu selanjutnya diadakan pada 14 Februari 2016. Dalam pemilu ini terdapat dua kandidat kuat, Faustin-Archange Touadera (Independen/non-partisan) dan Anicet-Georges Dologuele (URCA). Pemilu tersebut dimenangkan oleh Faustin Touadera dengan perolehan suara 63%. *Special Report* dari *United State Institute of Peace* mengatakan bahwa pemilu Republik Afrika Tengah tahun 2015-2016 berjalan tanpa kekerasan besar. Dikarenakan komitmen warga negara untuk memilih secara damai, upaya aktor internasional dan masyarakat sipil untuk mengendalikan diri serta menghormati waktu transisional dalam masa-masa pemilu.

KESIMPULAN

Resolusi konflik DK PBB melalui resolusi 2127 membawa dampak peningkatan keamanan yang mengakibatkan penurunan korban dari tahun 2012-2016 dan pengembalian kekuasaan dengan tata cara yang benar sesuai konstitusi yang berlaku. Peningkatan keamanan ditandai dengan penggabungan BINUCA dan MISCA menjadi MINUSCA. *Peacekeeping Operation* (MINUSCA) digunakan sebagai aktor untuk menstabilkan keamanan dari segala pemberontakan. DK PBB meminta dukungan masyarakat internasional seperti ECCAS dan Uni Afrika untuk berkoordinasi melindungi warga sipil Republik Afrika Tengah. Mengingat dinamika konflik yang terjadi mengalami perubahan dari konflik antara pemerintah dan pemberontak menjadi konflik antar kelompok etnis. Mulai dari kegagalan

Francois Bozize membagi kekuasaan kepada beberapa kelompok kepentingan, pembentukan koalisi penentang Bozize yaitu Seleka, sampai pemberontakan Anti-Balaka pasca lengsernya Michael Djotodia.

Keamanan yang dihasilkan oleh *Peacekeeping Operation* berupa pengurangan jumlah korban disetiap peristiwa terjadinya bentrokan antara kelompok pemberontak. Berdasarkan data statistik peristiwa bentrokan dan angka kematian yang diteliti oleh Matt-Batten-Carew, angka kematian korban konflik dari tahun 2013-2016 menurun, dari 1100 orang meninggal menjadi sekitar 30 orang yang menjadi korban kekerasan pada setiap peristiwa yang tercatat dalam *the Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED)*.

Sejumlah 1.200 Komunitas muslim diselamatkan dan bantuan lain seperti tikar, selimut, peralatan dapur, terpal dan tenda darurat di berikan kepada 120.000 warga sipil yang terlantar di delapan provinsi berbeda oleh UNHCR yang bekerjasama dengan MINUSCA.

Konsistensi Dewan Keamanan dalam upaya lanjutan berupa *peacebuilding* terlihat pada keberhasilan pengawalan MINUSCA pada pemilihan umum Republik Afrika Tengah pada tahun 2015-2016. *Special Report* dari *United State Institute of Peace* mengatakan bahwa pemilu Republik Afrika Tengah tahun 2015-2016 berjalan tanpa kekerasan besar. Dikarenakan komitmen warga negara untuk memilih secara damai, upaya aktor internasional dan masyarakat sipil untuk mengendalikan diri serta menghormati waktu transisional dalam masa-masa pemilu.

Dewan Keamanan PBB sebagai organisasi internasional berhasil mengupayakan *peacekeeping* dan *peacebuilding* sebagai resolusi konflik terhadap konflik internal di Republik Afrika Tengah dalam rentang waktu 2012-2016 melalui resolusi 2127. Dalam isu konflik RAT Dewan Keamanan PBB berhasil berperan sebagai instrumen, arena dan aktor. Sebagai instrumen, DK PBB dapat menjadi sarana menentukan penyelesaian isu-isu keamanan bagi negara-negara anggotanya melalui proses politik di dalam forum. Sebagai arena, DK PBB menjadi wadah berinteraksi antar negara anggota untuk menciptakan suatu rumusan kebijakan bersama (resolusi). Sebagai aktor, Dewan Keamanan berhasil menjadi aktor berbadan hukum yang mengikat negara-negara anggota telah bersepakat dan bersedia menyerahkan sebagian kedaulatannya pada organisasi internasional untuk menegakan keamanan dan memulihkan kedaulatan Republik Afrika Tengah.

Daftar Pustaka

BUKU

- Djafar, Z. (2012). *Profil dan perkembangan Ekonomi Politik Afrika*. Jakarta: U-I Press.
- Galtung, J. (1976). *Three Approaches to Peace: Peacekeeping, Peacemaking, and Peacebuilding*. Copenhagen: Ejlers.
- Hermawan, Y. (2007). *Transformasi dalam studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu, dan Metodologi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rittberger, V., & Zangl, B. (2006). *International Organization : Polity, Politics, and Policies*. USA: Palgrave Macmillan.
- Rudi, T. M. (2009). *Administrasi dan Organisasi Internasional*. Bandung.
- Sugiono, M., & Nazala, R. M. (2011). *Peacebuilding*. 3.
- Sugito. (2016). *Organisasi Internasional : Aktor dan Instrumen dalam Hubungan Internasional*. Yogyakarta: The Phinisi Press.
- Suwardi, S. S. (2004). *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*. Jakarta.

JURNAL

- Eberhard, M. R. (2014). *Crisis in the Central African Republic*. Retrieved from International Coalition For The Responsibility to Protect: <http://www.responsibilitytoprotect.org/index.php/crises/crisis-in-the-central-african-republic>

BERITA

- Firman, T. (2017, Agustus 2017). *Darah Terus Mengalir di Afrika Tengah*. Retrieved from Tirto.id: <https://tirto.id/darah-terus-mengalir-di-afrika-tengah-cuxP>
- Haryanto, A. (2017, Juli 1). *22 Orang Tewas dalam Konflik di Republik Afrika Tengah*. Retrieved from Tirto.id: <https://tirto.id/22-orang-tewas-dalam-konflik-di-republik-afrika-tengah-crMS>
- Republika. (2015, September 1). *Negara yang Berkubang Kudeta*. Retrieved from Republika: <https://www.republika.co.id/berita/koran/teraju/15/09/01/ntznka4-negara-yang-berkubang-kudeta>
- Rimanews. (2014, Februari 26). *Warisan Kolonialisme: Genosida di Afrika Tengah Terburuk di Seluruh Afrika*. Retrieved from Rimanews:

<http://archive.rimanews.com/internasional/read/20140226/144824/Warisan-Kolonialisme-Genosida-di-Afrika-Tengah-Terburuk-di-Seluruh-Afrika>

WEBSITE

GlobalSecurity. (2017, June 6). *Military*. Retrieved from Global Security:
<https://www.globalsecurity.org/military/world/africa/car-bozize.htm>

Permesti, L. (2014, Mei 30). Republik Afrika Tengah, Negara dan Konflik yang Terlupakan. Jakarta, Indonesia. Retrieved from
<https://www.dakwatuna.com/2014/05/30/52301/republik-afrika-tengah-negara-dan-konflik-yang-terlupakan/#axzz5SC1JXT17>